



## LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Jalan Pemuda, Persil No.1, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4892802 (*Hunting*), Faksimile (021) 4892884,  
Laman: [www.lapan.go.id](http://www.lapan.go.id)

---

### BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR 1291/HM.01/07/2021





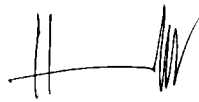
Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-07-2021), bertempat di LAPAN Pusat, Jl. Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : Prof. Dr. Thomas Djamaluddin  
N I P : 196201231987031002  
Jabatan : Kepala
2. N a m a : Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih  
N I P : 196311081989012001  
Jabatan : Sekretaris Utama
3. N a m a : Dr. Rika Andiarti  
N I P : 196701301987012001  
Jabatan : Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa
4. N a m a : Dr. Orbita Roswintiarti, M.Sc.  
N I P : 196201261987032001  
Jabatan : Deputi Bidang Penginderaan Jauh
5. N a m a : Ir. Halimurahman, MT.  
N I P : 196705031991011001  
Jabatan : Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah melaksanakan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Kepala Lapan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dengan rincian informasi yang dikecualikan sebagai terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal bagian Berita Acara ini.

#### TIM UJI KONSEKUENSI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Thomas Djamaluddin	Kepala	
2.	Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih	Sekretaris Utama	
3.	Dr. Rika Andiarti	Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa	
4.	Dr. Orbita Roswintiarti, M.c.	Deputi Bidang Penginderaan Jauh	
S.	Ir. Halimurahman, MT.	Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer	

LAMPIRAN  
 BERITA ACARA  
 UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 NOMOR 1291/HM0.01/08  
 TANGGAL 27 JULI 2021

No.	Materi/Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah	Jangka Waktu Informasi Yang dikecualikan	Hasil Evaluasi
		Pasal 17 Undang-Undang Komisi Pusat	Peraturan Perundang-undangan lainnya				
1	Daftar Riwayat Hidup Pegawai, hasil general check up pegawai/ pejabat, sumpah jabatan, pakta Integritas, hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas, kompetensi/rekomendasi pegawai, keputusan tim etika, biodata elektronik pegawai (database), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian	Huruf h	UU Nomor 8 Tahun 1974 jo. No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Kepegawaian	Pegawai yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis	Masih Relevan


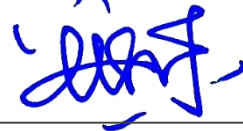


2	Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)	Huruf i	PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS Pasal 6: daftar penilaian pelaksanaan bersifat rahasia	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan	Kepegawaian	Mutlak/tidak terbatas	Masih Relevan
6	Organisasi dan tata Kerja	Kepala Biro SDM Orkum	Sekretariat Utama	Jakarta, 27 Juni 2014	Softcopy dan terungghah di situs lapan. go.id	3 Tahun	Masih Relevan
3	Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	Huruf i		Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN	Ketatausahaan	Mutlak/tidak terbatas kecuali atas perintah pengadilan/Komisi Informasi	
4	Dokumen kerjasama LAPAN termasuk dokumen teknis milik vendor yang memiliki <i>non disclose agreement</i>	Huruf l dan j		Adanya tuntutan dari pihak yang bekerjasama	Kerja sama	Sampai dengan dikeluarkannya kebijakan dan mendapat izin dari pihak-pihak terkait	Masih Relevan
5	Draf kerja sama yang belum selesai (dalam pembahasan)	Huruf l dan j		Menurut sifatnya dirahasiakan	Kerja sama	Sampai dengan dikeluarkannya kebijakan dan mendapat izin dari pihak-pihak terkait	Masih Relevan
6	Dokumen terkait pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Huruf b	Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten	Mengganggu perlindungan HKI	HKI	Sampai dengan jangka waktu perlindungan habis	Masih Relevan

7	Dokumen jenis komponen dan jenis alat uji (merk, model roket)	Huruf c dan i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Masih Relevan
8	Data propelan (dasar perancangan, komposisi, karakteristik, geometri rinci grain)	Huruf c dan i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/tidak terbatas	Masih Relevan
9	Desain dan cetak biru roket dan satelit	Huruf b, c, i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Masih Relevan
10	Dokumen Laboratorium dan peralatan proses propelan	Huruf c, i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Masih Relevan
11	Dokumen pembuatan dan evaluasi hasil pengujian roket dan satelit beserta hasil evaluasi	Huruf c, i		Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Masih Relevan
12	Software, subsistem/sistem untuk satelit, ruas bumi, roket dan LSU	Huruf c, i		Mengganggu proses penelitian	Pendukung Litbang	Sampai batas penelitian habis	Masih Relevan

13	Data TT & C Satelit LAPAN/Indonesia	Huruf b, c	UU No. 19 Tahun 2012 Tentang Hak Cipta	Keamanan dan Keselamatan satelit terkait pembajakan satelit oleh pihak lain	Pendukung Litbang	Minimum 25 Tahun	Masih Relevan
14	Peta Citra satelit untuk keperluan startegis Hankam	Huruf c		Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Pendukung Litbang	Mutlak/ tidak terbatas	Masih Relevan
15	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Huruf l dan j	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf b dan Pepres No. 70 Tahun 2012	Menimbulkan Penilaian yang tidak objektif dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat	Pengadaan Barang dan Jasa	Sampai ditetapkan pemenang lelang	Masih Relevan
16	Dokumen kontrak	Huruf l dan j	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf b dan Pepres No. 70 Tahun 2012	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Pengadaan Barang dan Jasa	Mutlak/tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penegakan hukum	Masih Relevan

17	Dokumen usulan peserta lelang pada saat lelang berlangsung	Huruf i	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6 huruf b dan Pepres No. 70 Tahun 2012	Mengganggu proses pelelangan	Pengadaan Barang dan Jasa	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang	Masih Relevan
18	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh: nkuitansi, SPP, SPM, SP2D)	Huruf j	UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 angka 28, pasal 40	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Keuangan	Sampai batas waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Masih Relevan
19	Naskah pedoman delegasi RI di forum internasional UNCUPOUS	Huruf I, f	UU No. 37 tentang hubungan luar negeri	Mengganggu kerahasiaan negara	Lain-lain	Sampai dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri dapat menjadi informasi yang terbuka untuk umum	Masih Relevan
20	Dokumen topologi data center	Huruf j	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Tindak Kriminal, dan pencurian data	Lain-lain	Mutlak tidak terbatas	Masih Relevan
21	Data Internet Protocol (IP) address yang bersifat lokal	Huruf j	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Penerobosan/penyalahgunaan akses		Mutlak tidak terbatas	Masih Relevan

22	Dokumen sistem manajemen database	Huruf j	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Penyalahgunaan oleh pihak lain		Mutlak tidak terbatas	Masih Relevan
23	Kode akses elektronik	Huruf j	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 34	Penerobosan/penyalahgunaan akses		Mutlak tidak terbatas	Masih Relevan

Jakarta, 27 Juli 2021			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Thomas Djamaluddin	Kepala	
2.	Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih	Sekretaris Utama	
3.	Ir. Halimurahman, MT.	Deputi Bidang Sains, Antariksa, dan Atmosfer	
4.	Dr. Rika Andiarti	Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa	
5.	Dr. Orbita Roswintiarti, M.Sc.	Deputi Bidang Penginderaan Jauh	